



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam elemen ini dimulai dengan membahas landasan teori-teori, yang akan menjelaskan mengenai konsep atau teori-teori yang relevan dengan analisis penelitian.

Kemudian terdapat penelitian terdahulu mengandung hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian sekarang.

Bersumber pada landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan.

Penulis akan menguraikan kerangka pemikiran yang berisikan kerangka teoritis yang diambil dari teori maupun konsep serta penelitian dahulu yang berupa bagan dan uraian singkat.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan David (1983), mendefinisikan dua arti *stakeholder* dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang pertama, *the wide sense of stakeholder* atau dalam arti luas merupakan setiap kelompok / individu yang diidentifikasi berpengaruh pada tercapainya tujuan suatu organisasi atau yang dipengaruhi dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. *Stakeholder* yang dimaksud disini seperti kelompok kepentingan publik, lembaga pemerintah, kelompok protes, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Kemudian yang kedua, *the narrow sense of stakeholder* atau dalam arti sempit merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi di mana organisasi bergantung pada kelangsungan hidupnya yang berkelanjutan. *Stakeholder* yang dimaksud disini seperti karyawan,

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemasok tertentu, segmen pelanggan, lembaga pemerintah utama, lembaga keuangan tertentu, pemegang saham, dan lain-lain.

Menurut Ghozali dan Chariri (2014), mengungkapkan bahwa *stakeholder theory* yaitu perusahaan bukan entitas yang beraktivitas pada kepentingan diri sendiri tetapi dengan memberikan manfaat untuk *stakeholdernya* seperti kreditor, pemasok, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Maka dengan itu, dukungan pemangku kepentingan memberikan pengaruh atas keberadaan perusahaan.

Menurut GRI (2016), pemangku kepentingan digambarkan sebagai individu ataupun entitas yang berpengaruh signifikan kepada kegiatan / produk / jasa yang dilakukan organisasi atau mempengaruhi kemampuan organisasi menerapkan strategi atau mencapai tujuan. Yang dimaksud pemangku kepentingan seperti karyawan / pekerja lainnya, *supplier*, kelompok rentan, pemegang saham, masyarakat sekitar, dan LSM / organisasi masyarakat lainnya.

Stakeholder mengendalikan / memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh pada penggunaan sumber ekonomi yang dipakai emiten. Maka *power stakeholder* dapat ditentukan pada besar kecilnya kekuatan yang dimiliki oleh sumber tersebut. Kekuatan yang dimaksud dapat berupa kemampuan untuk membatasi penggunaan sumber ekonomi terbatas seperti modal serta tenaga kerja, media akses yang berpengaruh, kemampuan mengatur perusahaan / kemampuan yang memberikan pengaruh penggunaan barang maupun jasa yang diperoleh perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri 2014).

Oleh karena itu, perusahaan dapat menerapkan teori *stakeholder* dalam menyajikan laporan keberlanjutannya secara transparan mengenai informasi aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teori



stakeholder juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan terutama yang berkaitan dengan dampak langsung pada aktivitas perusahaan. Elemen kunci yang penting dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan yaitu saling percaya, komitmen, dan kerjasama antara organisasi dan pemangku kepentingan (Aryal, 2017).

Keterlibatan perusahaan dengan para *stakeholder* internal dapat diciptakan pada konsep kebermanfaatannya dengan menjalin kerjasama untuk menciptakan suatu keselarasan usaha. Sedangkan hubungan para *stakeholder* eksternal berdasarkan pada hubungan yang sifatnya fungsional.

Menurut GRI (2016), keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pendekatan dapat dilakukan dengan meninjau media, terlibat dengan organisasi ilmiah maupun aktivitas kolaboratif dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut dapat cukup efektif, sehingga kebutuhan informasi pemangku kepentingan dilakukan dengan benar. Keterlibatan pemangku kepentingan yang sistematis, akan memperoleh pembelajaran dalam organisasi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Hal tersebut akan memperkuat kredibilitas laporan.

2. Teori Legitimasi

Menurut Dowling and Pfeffer (1975), konsep legitimasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menelaah hubungan lingkungan dengan organisasi. Legitimasi memberikan hubungan antara tingkat analisis masyarakat dengan organisasi. Legitimasi sangat diperlukan untuk organisasi, sehingga batasan-batasan atau definisi ditekankan pada norma dan nilai sosial serta anggapan pada batasan tersebut. Dan memberikan



prioritas untuk menganalisis sifat atau perilaku organisasi yang diambil berhubungan dengan lingkungan.

Menurut Gray, Kouhy dan Lavers (1994) (dalam Ghozali dan Chariri 2014), teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi yaitu sudut pandang teori dalam kerangka teori ekonomi politik. Yang diakibatkan oleh adanya pengaruh masyarakat yang dapat menetapkan alokasi sumber ekonomi maupun sumber keuangan dan lain-lain. Perusahaan lebih banyak menentukan kinerja yang berlandaskan pada lingkungan dan ungkapan informasi lingkungan untuk melegitimasi atau membetulkan kegiatan perusahaan di dalam masyarakat.

Teori legitimasi didasarkan pada kesepakatan sosial yang terjadi antara masyarakat kepada perusahaan, dimana perusahaan menjalankan kegiatan dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2014). Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan informasi sosial, lingkungan, serta ekonomi pada laporan keberlanjutan untuk akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat. Yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan masyarakat atas dampak aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Kesesuaian program perusahaan dengan harapan masyarakat pada kebijakan sosial dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat. Yang bertujuan memperoleh kepercayaan masyarakat dan organisasi / perusahaan yang dapat menjelaskan dan mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan perusahaan. Sehingga organisasi / perusahaan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan perusahaan untuk masa depan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.



3. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability report*)

Menurut GRI (2016), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yaitu praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Serta karena itu juga termasuk kontribusi organisasi yang positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka melalui proses ini, sebuah organisasi mengidentifikasi dampaknya yang signifikan pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterima secara global.

Menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Laporan keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Apabila LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan laporan keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, maka laporan keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



a. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Menurut WBCSD (2000), CSR merupakan komitmen dalam bisnis yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, masyarakat, komunitas lokal untuk kualitas hidupnya. Masalah utama yang termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu hak asasi manusia, hak karyawan, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan hubungan dengan pemasok.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perumusan dan implementasi strategi tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan perusahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) di pasar keuangan. Karena pertumbuhan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diamati sebagai peningkatan perhatian oleh investor pada kebutuhan untuk memperluas kriteria evaluasi investasi (Kłobukowska, 2017).

Menurut Camilleri (2017), tanggung jawab sosial perusahaan sudah berubah dan beradaptasi untuk mencerminkan realitas masyarakat saat ini. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi nilai yang didorong karena memberikan cara berpikir dan berperilaku yang baru. Keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan beralih dari kata “berbuat baik” menjadi “melakukan dengan berbuat baik”. Oleh karena itu, proporsi tanggung jawab sosial perusahaan yang terbaru dapat menarik praktisi. Terutama ketika perilaku

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dimiliki perusahaan berkelanjutan dan bertanggung jawab akan memberikan peningkatan yang tinggi dalam ekonomi, inovasi, efisiensi operasional, dan kualitas tinggi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, perusahaan bergantung pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab akan dipertimbangkan dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan pada pengungkapan CSR. Harapan perusahaan ditahun depan dengan mempunyai nilai positif yang dimiliki perusahaan pada kepedulian atas dampak ekonomi, lingkungan, serta sosial yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan merupakan sinyal yang diberikan perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk calon investor (Lindawati dan Puspita, 2015).

b. Pergeseran Paradigma 1P (Profit) ke 3P (Profit, Planet, People)

Atas berkembangnya waktu, pemahaman pada arti dan manfaat nilai usaha dalam bisnis mengalami pergeseran konsep bisnis. Dari paradigma paradigma 1P (*Profit*) atau *single bottom line* menjadi 3P (*Profit, Planet, People*) atau *triple bottom line*. Paradigma 1P (*Profit*) atau *single bottom line* dalam keberlanjutan menggambarkan upaya perusahaan untuk mengembangkan kerangka kerja dan berfokus pada nilai untuk mendorong keberlanjutan perusahaan. *Single bottom line* menjelaskan prinsip-prinsip utama pendekatan untuk menjadikan nilai sebagai titik awal dalam perusahaan keberlanjutan. Perusahaan dapat menggunakan laba sebagai faktor utama suatu perusahaan dalam keberlanjutannya, mencakup aspek dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tanggapan keberlanjutan terus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkat dalam skala dan urgensi. Masyarakat perlu bertindak cepat untuk memulai proses transformasi ekonomi. Kekuatan pasar merupakan harapan terbaik untuk melakukan perubahan yang cepat, dramatis, dan global. Sehingga mengakibatkan, bergesernya konsep *Single bottom line* ke *triple bottom line* sebagai hal utama untuk mendorong perubahan dalam bisnis (Gilding, Hogarth, dan Reed 2002).

3P (*Profit, Planet, People*) atau *triple bottom line* merupakan istilah yang diciptakan oleh Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul: *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Konsep *triple bottom line* berfokus pada kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial (Elkington 1997). Konsep tersebut mengartikan bahwa setiap usaha perusahaan tidak hanya mementingkan nilai (*profit*) melainkan perusahaan dapat mensejahterakan masyarakat (*people*) serta dapat menjamin keberlangsungan hidup yang ada di bumi (*planet*) (Nugroho, 2007 dalam Lindawati dan Puspita, 2015).

Menurut Lindawati dan Puspita (2015), Konsep nilai atau keuntungan (*profit*) adalah tujuan setiap operasi usaha perusahaan. Namun dalam konteks keberlanjutan, nilai (*profit*) diartikan sebagai manfaat dari ekonomi yang dapat menunjang kelangsungan hidup suatu perusahaan. Selain itu, nilai (*profit*) dalam konteks ini lebih dari sekedar nilai atau keuntungan tetapi lebih ke *fair trade* dan *ethical trade* dalam kegiatan usaha. Masyarakat (*people*) merupakan salah satu pemangku kepentingan perusahaan yang penting dalam menjalankan usaha. Dampak dari aktivitas perusahaan kemungkinan besar akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan manfaat yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Lingkungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(planet) sering kali terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Karena lingkungan merupakan sumber daya perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat. Apabila perusahaan dapat menjaga dan melestarikan alam maka perusahaan akan mendapatkan ketersediaan sumber daya alam yang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Apabila perusahaan melakukan penggunaan alam yang berlebihan akan berdampak buruk untuk kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat sekitar.

Paradigma 3P (*Profit, Planet, People*) mewajibkan perusahaan untuk mementingkan kepentingan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu semua pihak yang terlibat dan terdampak dari aktivitas perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* konsep 3P (*Profit, Planet, People*) menjadi acuan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga apabila perusahaan menerapkan konsep 3P (*Profit, Planet, People*) dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

4 Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability report Guidelines*)

a. Standar GRI 2016 (Global Reporting Initiative)

GRI yaitu organisasi internasional yang independen dapat membantu bisnis dan organisasi lain bertanggung jawab pada dampaknya, dengan menyediakan bahasa yang global untuk menginformasikan dampak tersebut. Komisi Dunia untuk Pembangunan serta Lingkungan menentukan tujuan aspirasional pembangunan berkelanjutan dengan deskripsi pembangunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atas pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (GRI, 2016). Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pelaporan keberlanjutan yang memberikan partisipasi yang positif serta negatif pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

GRI merupakan pedoman yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan. Tujuan GRI yaitu untuk mengutamakan pengungkapan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Prinsip pelaporan GRI yang digunakan dalam menentukan isi laporan keberlanjutan antara lain:

(1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Dalam pelaporan keberlanjutannya, organisasi diwajibkan memberikan identifikasi pemangku kepentingan dan cara organisasi menanggapi harapan serta kepentingan dari para pemangku kepentingan.

(2) Konteks Keberlanjutan

Dalam pelaporan keberlanjutannya, organisasi diwajibkan mengungkapkan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang luas.

(3) Materialitas

Dalam pelaporan keberlanjutannya, organisasi diwajibkan menyajikan laporan yang terdiri atas topik-topik dalam dampak aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan atau yang mempengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan.

(4) Kelengkapan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam pelaporan keberlanjutannya, organisasi diwajibkan menyajikan cakupan topik material serta batasan yang mencerminkan dampak pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan, dengan demikian para pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian atas kinerja organisasi tersebut.

Pendekatan organisasi terhadap ketelibatan pemangku kepentingan dapat diungkapkan sesuai dengan panduan dalam Standar GRI 2016 antara lain:

(1) Pengungkapan 102-40

Organisasi diwajibkan mengungkapkan kelompok pemangku kepentingan yang terlibat oleh organisasi dalam bentuk daftar.

(2) Pengungkapan 102-41

Organisasi diwajibkan mengungkapkan total karyawan yang terangkum dalam perundingan kolektif dengan bentuk presentase.

(3) Pengungkapan 102-42

Organisasi diwajibkan mengungkapkan informasi tentang dasar dalam identifikasi dan menunjuk para pemangku kepentingan yang dilibatkan.

(4) Pengungkapan 102-43

Organisasi diwajibkan mengungkapkan informasi pendekatan pada keikutsertaan para pemangku kepentingan, tingkat keikutsertaan berdasarkan jenis serta kelompok pemangku kepentingan apabila terlibat dengan proses penyusunan laporan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Pengungkapan 102-44

Organisasi wajib mengungkapkan informasi mengenai topik utama dan hal-hal yang diajukan melalui keikutsertaan pemangku kepentingan, termasuk cara organisasi dalam menanggapi topik-topik utama dan kelompok pemangku kepentingan yang mengajukan masing-masing hal dan topik utama.

Dalam penilaian materialitas di GRI, GRI G4 memberikan panduan detail untuk mengidentifikasi aspek dan topik material. Pedoman GRI G4 menjabarkan empat urutan langkah untuk merencanakan dan menerapkan materialitas. Empat langkah tersebut antara lain:

(1) Identifikasi

Organisasi wajib mempertimbangkan daftar pada aspek GRI dan topik lainnya; menerapkan prinsip konteks keberlanjutan, inklusivitas pemangku kepentingan dengan identifikasi aspek serta topik yang berdampak relevan terhadap sosial, lingkungan, serta ekonomi yang berkenaan dengan lokasi terjadinya dampak, dan mencantumkan aspek dan topik lainnya yang relevan beserta batasannya.

(2) Prioritas

Organisasi menerapkan prinsip inklusivitas pemangku kepentingan serta materialitas dengan penilaian aspek serta topik lainnya yang relevan dari dampak sosial, lingkungan, serta ekonomi organisasi yang tinggi. Dan berpengaruh pada penilaian dan keputusan pemangku kepentingan; mengidentifikasi aspek material dengan penilaian tersebut; menentukan kriteria untuk menentukan topik menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

material; menentukan tingkat cakupan, penjelasan yang akan diungkapkan; total data serta mengungkapkan aspek material yang dituangkan dalam laporan beserta batasan dan tingkat cakupannya.

(3) Validasi

Organisasi menerapkan prinsip kelengkapan dan inklusivitas pemangku kepentingan, menilai aspek material yang berhubungan dengan cakupan, batasan, serta periode untuk menentukan bahwa laporan tersebut memberikan penilaian yang wajar dan seimbang dari dampak sosial, lingkungan, serta sosial organisasi yang tinggi serta memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi; menyetujui aspek material yang diidentifikasi dengan keputusan senior internal, menyiapkan sistem serta proses untuk mengumpulkan informasi yang diungkapkan, menentukan informasi yang tersedia serta menjelaskan mana yang masih perlu untuk membuat pendekatan manajemen dan sistem pengukuran.

(4) *Review* (Tinjauan)

Organisasi menerapkan prinsip konteks keberlanjutan dan inklusivitas pemangku kepentingan dengan melakukan tinjauan aspek yang penting dari laporan tahun sebelumnya; menggunakan hasil tinjauan tersebut untuk menjelaskan dan mengidentifikasi langkah pertama untuk identifikasi pada laporan keberlanjutan selanjutnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Gambar 2.1

Panduan Menentukan Aspek Material dan Batasannya



Sumber: GRI G4 (2013)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. AccountAbility

AccountAbility merupakan perusahaan standar keberlanjutan dan konsultasi global yang bekerja sama dengan dunia usaha, pemerintah, dan organisasi multilateral untuk memajukan praktik-praktik usaha yang bertanggung jawab dan meningkatkan kinerja jangka panjang.

Pekerjaan AccountAbility didasarkan pada Seri Standar AA1000. Seri Standar AA1000 terdiri atas:

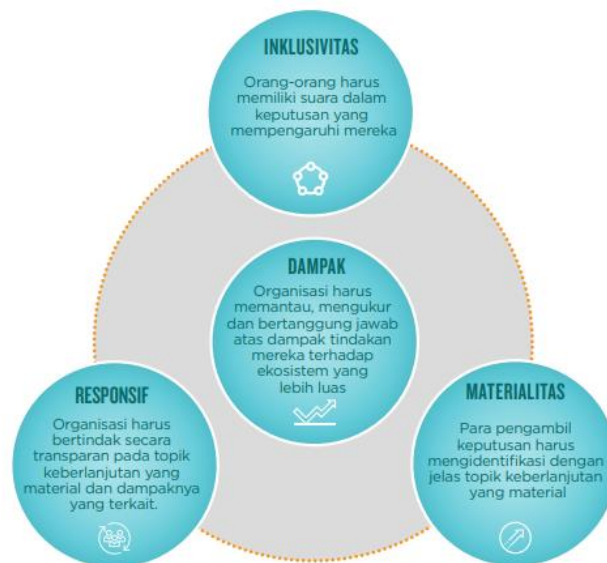
(1) AA1000AP

AA1000 *AccountAbility Principles* (AA1000AP) adalah kerangka kerja berbasis prinsip yang diterima secara internasional yang memandu organisasi melalui proses mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menanggapi tantangan keberlanjutan, dengan tujuan meningkatkan kinerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

jangka panjang. Tujuan AA1000AP yaitu menyediakan prinsip panduan kepada organisasi yang diterima di internasional. Dengan memberikan oerganisasi untuk mengakses, mengelola, meningkatkan, dan mengomunikasannya secara akuntabilitas dan kinerja keberlanjutannya. AA1000AP juga menyediakan pedoman untuk implementasi prisip yang digunakan untuk verifikasi dengan kriteria yang jelas dan digunakan secara bersama pada setiap pedoman industri, pasar maupun topik yang sesuai dengan standar keberlanjutan (AA1000AP, 2018). Prinsip panduan yang dimaksud ada 4 yaitu dampak, inklusivitas, materialitas, dan responsif.

Gambar 2.2
Prinsip AccountAbility pada AA1000AP



Sumber: AA1000AP (2018)

(2) AA1000AS

AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3) merupakan standar yang diakui secara internasional, independen industri, dan tersedia secara bebas yang memberikan persyaratan bagi penyedia assurance yang berlisensi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntabilitas untuk melakukan *assurance* keberlanjutan yang berkualitas tinggi pada penerapan AA1000AP (2018) oleh organisasi pelapor. AA1000AS v3 menyediakan cara untuk meminta pertanggungjawaban organisasi atas manajemen keberlanjutan, kinerja, dan praktik pelaporannya dengan penilaian kepatuhan organisasi pada AA1000AP (2018). AA1000AS v3 berprioritas pada cara yang dibutuhkan pada *assurance* yang lengkap dan bertanggungjawab berdasarkan Prinsip Inklusivitas, Materialitas, Responsif, dan Dampak yang ada pada AA1000AP (2018) (AccountAbility, 2020).

Gambar 2.3
Proses Assurance AA1000AS v3



Sumber: AA1000AS v3 (2020)

(3) AA1000SES

Menurut AccountAbility (2015), AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (AA1000SES) adalah kerangka kerja yang berlaku umum untuk penilaian, desain, implementasi dan komunikasi keterlibatan pemangku kepentingan yang berkualitas. Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

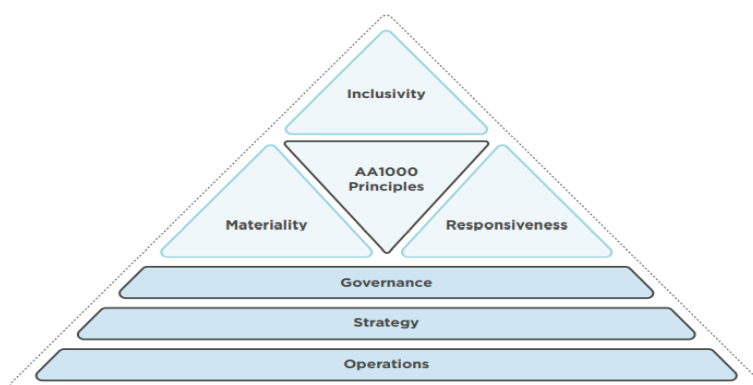
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bukan hanya anggota masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Tetapi mereka adalah kelompok individu maupun individu atau organisasi yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh kegiatan organisasi, produk atau layanan dan / atau kinerja terkait sehubungan dengan isu-isu yang harus ditangani oleh keterlibatannya. Keikutsertaan pemangku kepentingan merupakan proses yang digunakan oleh organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait tujuan yang jelas untuk memenuhi hasil yang disepakati.

Keterlibatan pemangku kepentingan harus ada dalam budaya dan fungsi inti dari suatu organisasi. Untuk tercapainya keterlibatan pemangku kepentingan, dalam AA1000SES memerlukan komitmen terhadap prinsip yang ada dalam AA1000APS dan integrasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola organisasi, strategi dan operasi organisasi. Melalui komitmen dan integrasi, hasil yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan akan menuju pada hasil strategi dan operasional.

Gambar 2.4
Integrasi Prinsip AA1000 pada Keterlibatan Pemangku Kepentingan



Sumber: AA1000SES (2015)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Suatu organisasi harus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut antara lain:

(a) Inklusivitas

Keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan dan memenuhi reaksi yang akuntabel serta strategi terhadap keberlanjutan organisasi.

(b) Materialitas

Menentukan relevansi dan signifikansi suatu masalah yang mempengaruhi keputusan, kinerja suatu organisasi, tindakan dan para pemangku kepentingan.

(c) Responsif

Tanggapan organisasi pada isu-isu pemangku kepentingan yang berpengaruh pada kinerja keberlanjutannya, dan diwujudkan dalam keputusan, kinerja, tindakan, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, ketiga prinsip akuntabilitas tersebut memerlukan proses keterlibatan pemangku kepentingan yang komprehensif dan seimbang, untuk menangani, menanggapi masalah, dan dampak dengan cara yang akuntabel.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

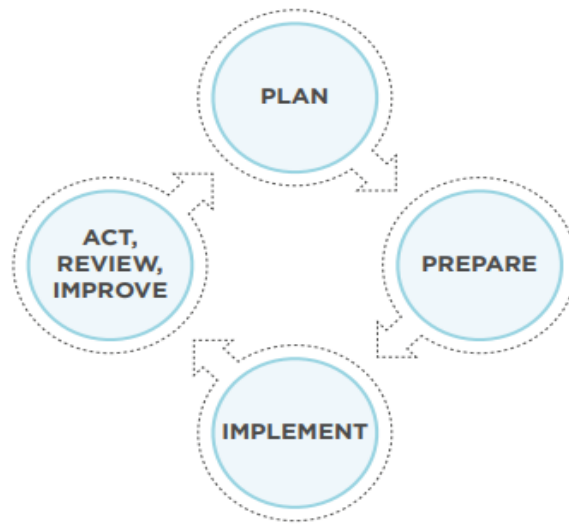
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.5

Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan



Sumber: AA1000SES (2015)

Proses pelibatan pemangku kepentingan AA1000SES mencakup empat tahap, antara lain:

(a) Plan

- (i) Membuat profil dan memetakan para pemangku kepentingan
- (ii) Menentukan tingkat dan metode yang terlibat dengan pemangku kepentingan
- (iii) Menetapkan batas-batas pengungkapan keterlibatan dan mengkomunikasikan batas-batasannya kepada para pemangku kepentingan
- (iv) Membuat rancangan rencana keterlibatan
- (v) Menetapkan indikator

(b) Prepare

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c.

- (i) Memobilisasi sumber daya
- (ii) Membangun kapasitas
- (iii) Mengidentifikasi dan mempersiapkan risiko keterlibatan
- (c) *Implement the engagement plan*
 - (i) Mengundang pemangku kepentingan untuk terlibat
 - (ii) Mengarahkan pemangku kepentingan
 - (iii) Melibatkan
 - (iv) Mendokumentasikan keterlibatan dan *output*
 - (v) Menganalisis keterlibatan dan *output* serta mengembangkan rencana aksi
- (d) *Act, Review, and Improve*
 - (i) Memantau dan mengevaluasi keterlibatan
 - (ii) Mempelajari dan meningkatkan
 - (iii) Mengembangkan dan menindaklanjuti rencana aksi
 - (iv) Melaporkan keterlibatan

POJK Nomor 51/POJK.03/2017

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (POJK 51) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengharuskan seluruh perusahaan publik dan LJK di Indonesia untuk menerbitkan laporan keberlanjutan atau laporan tahunan yang terintegrasi. Laporan keberlanjutan perusahaan dapat diterbitkan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terpisah dengan laporan tahunan atau dijadikan satu dengan laporan tahunan. Dalam POJK 51 mengatur informasi keberlanjutan yang dilaporkan oleh organisasi yang mencakup topik sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kerangka kerja pelaporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan POJK 51 harus memuat informasi antara lain:

- (1) Penjelasan strategi keberlanjutan.
- (2) Tinjauan aspek keberlanjutan dengan perbandingan kinerja perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Aspek keberlanjutan mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.
- (3) Profil singkat LJK, Perusahaan Publik serta Emiten. Mencakup visi dan misi perusahaan serta profil perusahaan.
- (4) Penjabaran pedoman keberlanjutan. Mencakup kebijakan untuk menanggapi tantangan dalam memenuhi strategi keberlanjutan, strategi pencapaian target, dan penjelasan dari Direksi.
- (5) Tata kelola keberlanjutan. Mencakup diskripsi dari tugas seluruh pihak yang bertanggung jawab, pengembangan kompetensi, prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko, dan masalah yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh.
- (6) Kinerja keberlanjutan. Mencakup aktivitas untuk membangun budaya keberlanjutan, deskripsi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tanggung jawab pada pembangunan jasa dan / atau produk berkelanjutan.
- (7) Persetujuan secara tertulis dari pihak independen, jika ada.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (8) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.
- (9) Tanggapan LJK, Perusahaan Publik atau Emiten terhadap *feedback* laporan tahun sebelumnya.

d. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

SASB menetapkan standar khusus industri untuk pengungkapan keberlanjutan. Konsep SASB berasal setelah para peneliti di Harvard University mulai meneliti materialitas non-keuangan dan penerapannya ditingkat industri (Aryal, 2017).

SASB mengembangkan standar akuntansi keberlanjutan untuk 77 industri. Standar SASB mengidentifikasi tata kelola dan manajemen pada dampak sosial dan lingkungan perusahaan yang diakibatkan oleh produksi barang serta jasa, dan tata kelola, pengelolaan modal sosial serta lingkungan yang diperlukan untuk terciptanya nilai dalam jangka panjang. SASB dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan material finansial kepada investor (SASB, 2018).

Standar SASB meliputi:

(1) Topik pengungkapan

Yaitu terdapat satu set minimum topik pengungkapan khusus industri yang kemungkinan besar merupakan informasi material, dan deskripsi singkat mengenai bagaimana manajemen atau pengelolaan yang salah pada setiap topik yang dapat mempengaruhi penciptaan nilai.

(2) Matrik akuntansi

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yaitu serangkaian matrik akuntansi kuantitatif dan/atau kualitatif yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja pada setiap topik.

(3) Protokol teknis

Yaitu setiap matrik akuntansi disertai dengan protokol teknis yang memberikan panduan tentang definisi, ruang lingkup, implemtasi, kompilasi, dan presentasi yang semuanya dimaksudkan untuk membentuk kriteria yang sesuai untuk jaminan pihak ketiga.

(4) Matrik aktivitas

Yaitu seperangkat matrik yang mengukur skala bisnis perusahaan dan dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan matrik akuntansi untuk menormalkan data dan memfasilitasi perbandingan.

e. ***International Integrated Reprotng Council (IIRC)***

Kerangka kerja IIRC menempatkan penekanan tinggi pada interaksi pemangku kepentingan dan dukungan sebagai kunci dari model bisnis organisasi dan penciptaan nilai. IIRC tidak memberikan pedoman khusus seperti yang terdapat dalam GRI, kerangka kerja IIRC menekankan perlunya memberikan wawasan tentang kualitas hubungan organisasi dengan para pemangku kepentingan beserta sifatnya (Aryal, 2017).

Kerangka IIRC bertujuan untuk menentukan prinsip dan isi panduan elemen yang mengatur semua konten dari laporan yang terintegrasi, serta menjelaskan konsep yang mendasarinya. Terdapat 7 (tujuh) prinsip panduan untuk mendukung persiapan dan penyajian laporan terpadu, menginformasikan isi laporan dan bagaimana informasi disajikan. 7 (tujuh)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

prinsip tersebut yaitu fokus strategi dan tujuan masa depan, konektivitas informasi, hubungan pemangku kepentingan, materialitas, keringkasan yang padat isinya, keandalan, kelengkapan, serta konsistensi dan komparabilitas (International Integrated Reporting Council, 2021).

5. Materialitas

a. Pengertian

Menurut GRI (2016), materialitas dalam laporan keuangan adalah ambang batas yang mempengaruhi ketetapan ekonomi pengguna laporan keuangan, seperti investor. Konsep ini juga sama dengan pentingnya pada laporan keberlanjutan, akan tetapi menyangkut dua dimensi yakni akibat yang luas serta pemangku kepentingannya. Pada laporan keberlanjutan, materialitas didefinisikan sebagai prinsip yang digunakan untuk menetapkan topik yang sesuai dengan memperhatikan mana yang cukup penting sehingga wajib dilaporkan. Topik material tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama, dan dalam laporan keberlanjutan diharapkan mencerminkan topik-topik yang prioritas atau kepentingannya yang tinggi.

Menurut AccountAbility (2018), materialitas berkaitan pada identifikasi dan prioritas topik yang relevan pada keberlanjutan, dengan pertimbangan pada dampak setiap topik untuk organisasi dan para pemangku kepentingan. Istilah materialitas dijelaskan dalam konteks pelaporan keuangan. Namun arti dari istilah tersebut sekarang mencakup pengungkapan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh topik keberlanjutan yang mempengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang memberikan dampak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pada kinerja emiten atau organisasi dan para pemangku kepentingan untuk jangka panjang, menengah, maupun jangak pendek.

Topik material merupakan topik yang memberikan tingkat signifikansi yang tinggi sehingga memberikan pengaruh maupun dampak pada penilaian, tindakan, keputusan dan kinerja dari emiten atau organisasi serta para pemangku kepentingan untuk pendek, menengah, dan panjang.

Pada pelaporan keberlanjutan, konsep materialitas dikenal sebagai ambang pelaporan, di mana berbagai pemangku kepentingan dan topik yang lebih luas diakui (Beske et al. ,2019). Menurut Aryal (2017) analisis materialitas bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terdapat resiko atau peluang bagi perusahaan dengan mempertimbangkan masalah yang memprihatinkan.

b. Melaporkan Topik Material

(1) Informasi umum tentang proses (GRI 102)

GSSB (2016) pada GRI 102-46-a mengemukakan bahwa organisasi yang melakukan pelaporan wajib mengungkapkan informasi yang berkenaan dengan penjelasan proses dalam menentukan isi laporan dan *boundary* atas topik. Terdapat empat prinsip untuk menetapkan isi laporan dan *topic boundary* yaitu inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan.

GSSB (2016) pada GRI 102-46-b mengemukakan bahwa organisasi yang melakukan pelaporan harus melaporkan informasi mengenai pendeskripsian cara organisasi mengaplikasikan prinsip pelaporan yang dijelaskan untuk penentuan isi laporan dengan meninjau kegiatan organisasi,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akibat, dan harapan organisasi, serta kepentingan para pemangku kepentingannya.

GSSB (2016) pada *clause* 6.1 mengemukakan bahwa ketika organisasi yang melakukan pelaporan dalam informasi pada pengungkapan 102-46, organisasi diwajibkan untuk menjelaskan proses prinsip materialitas yang digunakan dalam identifikasi topik material, termasuk asumsinya.

(GSSB 2016a) pada 102-47 mengemukakan bahwa organisasi yang melakukan pelaporan wajib mengungkapkan informasi topik material dalam bentuk daftar yang digunakan dalam proses penentuan isi laporan. Dalam menetapkan topik dianggap penting, organisasi dapat menerapkan prinsip inklusivitas pemangku kepentingan dan prinsip materialitas. Materialitas dalam hal ini memberikan identifikasi topik material berdasarkan dua dimensi, pentingnya dampak sosial, lingkungan, serta ekonomi. Dampak tersebut memberikan pengaruh untuk keputusan dan penilaian pemangku kepentingan.

(2) Informasi spesifik tentang topik material (GRI 103)

Informasi spesifik mengenai topik material dijelaskan dalam GRI 103. GSSB (2016b) pada 103-1-a mengemukakan bahwa setiap topik yang dianggap material, organisasi pelapor wajib mengungkapkan informasi yang dapat menjelaskan alasan topik tersebut dapat bersifat material. Topik material yaitu dampak dari aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berpengaruh signifikan dari kegiatan organisasi, dan memberikan pengaruh pada penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan. Penjelasan alasan topik material dapat mendeskripsikan dampak yang signifikan yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



diungkapkan dan harapan, kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan atas topik, dan mendeskripsikan proses yang digunakan dalam identifikasi dampak tersebut yang berkaitan dengan topik.

(GSSB 2016b) pada 103-1-b mengemukakan bahwa untuk semua topik material, organisasi yang melaporkan wajib mengungkapkan informasi yang menjelaskan *topic boundary* yang meliputi penjelasan tempat terjadinya dampak topik material, dan keikutsertaan organisasi pada dampak-dampak tersebut. Tempat atas terjadinya suatu dampak tersebut dapat dijelaskan dengan penentuan organisasi terjadinya dampak seperti organisasi / entitas dalam organisasi dan / atau entitas / organisasi yang berhubungan dengan bisnis organisasi. Contoh keterlibatan entitas / organisasi atas dampak dapat dijelaskan dengan organisasi yang telah menyebabkan atau ikut kontribusi pada dampak, maupun yang secara langsung berkaitan pada dampak dari kegiatan bisnis. Setiap organisasi harus menjelaskan setiap pembatasan khusus terkait batasan topik, namun apabila tidak dapat mengungkapkan dalam pelaporannya dapat mencantumkan alasan yang disetujui untuk pengungkapan topik yang spesifik.

c. Pengujian Materialitas

Menurut AA1000AP (2018), untuk memutuskan dan mengambil tindakan yang lebih baik, organisasi dan pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi topik material bagi kinerja organisasi yang berkelanjutan. Topik material merupakan topik yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dan pemangku kepentingannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kriteria kepatuhan yang dijelaskan dalam AA1000AP (2018) digunakan untuk mengarahkan organisasi dalam menetapkan prinsip materialitas dan memantau kemajuan penerapannya. Kriteria kepatuhan tersebut juga digunakan oleh penyedia *assurance* untuk menilai penerapan prinsip dalam organisasi. Kriteria kepatuhannya meliputi:

- (1) Pembangunan komitmen, integrasi, dan kapasitas
 - (a) Membangun proses penetapan materialitas yang luas di seluruh organisasi, kuat, sistematis dan berkelanjutan di bawah tata kelola manajemen senior, termasuk keterlibatan lintas fungsi utama.
 - (b) Memastikan integrasi proses penilaian di seluruh organisasi, termasuk melalui proses yang relevan, seperti manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan dan prosedur internal.
 - (c) Menyediakan kompetensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan hasil proses penilaian materialitas.
- (2) Penetapan materialitas
 - (d) Menetapkan batas yang jelas dan konsisten, serta tujuan, periode waktu dan ruang lingkup, untuk penilaian materialitas, dengan asumsi-asumsi mendasar yang terdokumentasi dengan tepat.
 - (e) Mengidentifikasi dan mewakili topik dengan baik dari berbagai sumber.
 - (f) Mengevaluasi relevansi topik keberlanjutan yang material yang teridentifikasi berdasarkan kriteria eksplisit yang sesuai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (g) Menentukan signifikansi, kemungkinan dan dampak saat ini dan dampak yang diharapkan di masa depan dari topik keberlanjutan material yang teridentifikasi, yang menggunakan kriteria dan ambang batas yang sesuai
 - (h) Mempertimbangkan keberlanjutan yang terus berkembang, ekonomi makro, geopolitik dan konteks peraturan dan kematangan topik dan masalah, yang memungkinkan untuk perbedaan yang terkait dengan industri, geografis, budaya dan tingkat operasional.
 - (i) Memasukkan cara mengatasi konflik atau dilema yang timbul dari penyimpangan atau pertentangan ekspektasi tentang topik material.
- (3) Komunikasi
- (j) Buat dan ungkapkan pemahaman dan prioritas yang komprehensif dan seimbang dari topik keberlanjutan material untuk organisasi dan pemangku kepentingannya.

d. Penilaian Materialitas

Dalam GRI (2016) menyajikan contoh matriks materialitas untuk tujuan sebagai panduan dalam menentukan prioritas topik. Matriks materialitas memperlihatkan cara dua dimensi untuk melakukan penilaian topik bersifat material dan suatu topik dapat bersifat material hanya berdasarkan salah satu dimensi. Dengan matriks materialitas dapat membantu organisasi untuk menyajikan masalah material secara visual. Penggunaan matriks materialitas tidak diharuskan, tetapi organisasi harus memberikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

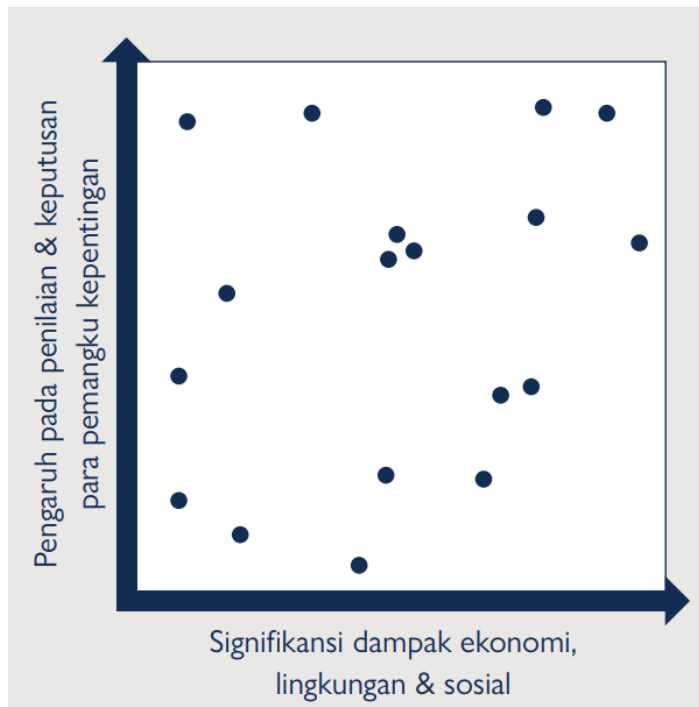
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

identifikasi topik material dalam dua dimensi pada penerapan prinsip materialitas.

Gambar 2.6

Matriks Materialitas

Representasi visual dari penentuan prioritas topik



Sumber: GRI (2016)

Menurut GRI (2016), untuk menentukan topik material, dapat mempertimbangkan faktor-faktor:

- (1) Dampak ekonomi, lingkungan, sosial yang penting yang telah diidentifikasi organisasi melalui investigasi yang kuat oleh ahli atau badan terkait;
- (2) Kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan internal misalnya pemegang saham serta karyawan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang luas, serta topik yang ditentukan pemangku kepentingan;
- (4) Topik utama dan ancaman untuk masa depan, yang diungkapkan rekan-rekan ataupun kompetitor;
- (5) Hukum, perjanjian internasional, aturan, atau kesepakatan sukarela pada tingkat strategis yang signifikan bagi organisasi dan pemangku kepentingan;
- (6) Nilai, strategi, aturan, sistem manajemen operasional, tujuan, serta sasaran organisasi yang utama;
- (7) Kompetensi inti dari organisasi dan gaya berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan;
- (8) Imbas bagi organisasi yang terpaut pada dampak atas lingkungan, ekonomi dan/atau masyarakat luas;
- (9) Topik material secara tepat yang diutamakan dalam pelaporan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu Kualitatif

- a. Bertemakan Materialitas

Devi (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja *Corporate social responsibility* (CSR) Berdasarkan Pengungkapan Topik Material Dalam Laporan Keberlanjutan”. Objek penelitiannya pada PT Unilever Indonesia Tbk untuk menganalisis proses penentuan topik material yang dilaporkan dan kinerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan topik yang dianggap material yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Topik Material Laporan tidak ada kesesuaian dengan Standar G4 dan GRI 2016.

Lindman et al. (2020) dengan judul “*Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate: A Nordic mining perspective*”. Objek penelitian pada industri pertambangan nordik dan pemangku kepentingannya. Dengan menganalisis bagaimana perusahaan pertambangan dan pemangku kepentingan mengevaluasi berbagai aspek keberlanjutan, menggambarkan persamaan dan perbedaan antara evaluasi masing-masing dan mengeksplorasi apakah konsep analisis materialitas dapat digunakan sebagai alat untuk praktik CSR perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Kelompok manajemen dan pemangku kepentingan perusahaan mengevaluasi aspek-aspek dalam matriks. Para pemangku kepentingan mengevaluasi aspek berdasarkan kepentingan yang dirasakan dan perusahaan terhadap keberhasilan bisnis. Analisis materialitas menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan menilai semua aspek keberlanjutan sebagai hal yang penting. Kelompok manajemen menganggap analisis materialitas sebagai alat yang berguna untuk praktik CSR strategis mereka.

Inyangudom (2020) dengan judul “*Materiality in the context of Sustainability*”. Objek penelitian pada 13 perusahaan Swedia dari sektor manufaktur, perbankan, dan telekomunikasi. Dengan menganalisis bagaimana organisasi menggambarkan aspek inti materialitas dalam laporan keberlanjutan dan bagaimana perusahaan melaporkan penilaian materialitasnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dengan mempelajari tiga sektor, temuan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan bahwa mereka semua memiliki pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan dan menggambarkan aspek inti materialitas, yang cukup memahami mengingat operasi mereka yang berbeda. Namun, aspek yang paling sering dibahas dalam laporan mereka dalam hal mengidentifikasi masalah material termasuk pemilihan pemegang saham dan keterlibatan, proses keterlibatan, analisis materialitas, metode penilaian materialitas, prioritas masalah materialitas yang dipilih, nilai saham, penciptaan nilai dan metrik nilai. Temuan juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan melaporkan lebih dari sekadar mematuhi peraturan dan kerangka kerja dengan memberikan informasi yang berguna baik dalam kata-kata maupun angka. Ini adalah pertanda baik yang menunjukkan bahwa perusahaan paling tertarik untuk melaporkan materialitas.

Beske et al. (2019) dengan judul “*Materiality Analysis in Sustainability and Integrated Reports*”. Objek penelitian pada 33 perusahaan Jerman yang terdaftar dalam indeks pasar saham HDAX 110 pada tahun 2014 hingga 2017. Dengan menganalisis sejauh mana perusahaan melaporkan analisis materialitasnya, metode yang digunakan untuk analisis pemangku kepentingan dan topik/aspek, serta apakah terdapat pengungkapan informasi penilaian materialitas yang lebih tinggi karena G4. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagian besar perusahaan melaporkan setidaknya sampai batas tertentu tentang analisis materialitas mereka tetapi tidak memberikan informasi rinci dalam banyak kasus, dengan demikian meninggalkan beberapa indikasi bahwa perusahaan terutama mengandalkan strategi legitimasi untuk keberlanjutan dan pelaporan yang terintegrasi. Perusahaan memberikan definisi (eksplisit atau implisit) dari analisis materialitas, yang memberikan wawasan pertama tentang apakah perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membedakan antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dan indeks pengungkapan menunjukkan ceteris paribus tingkat pelaporan yang meningkat karena penerapan GRI G4 dan peningkatan lain pada tahun 2017, di mana perusahaan yang dinilai harus mengenali persyaratan pelaporan lebih lanjut melalui undang-undang CSR di Jerman.

Slacik dan Greiling (2019) dengan judul “*Compliance With Materiality in G4-Sustainability reports by Electric Utilities*”. Objek penelitian pada 186 perusahaan utilitas listrik. Dengan menganalisis bagaimana materialitas didokumentasikan dalam SR oleh EUC, *Stakeholder-Material Aspects (MA)* yang didokumentasikan dalam GRI-G4 SR, bagaimana MA diidentifikasi yang tercakup dalam SR serta kualitas komunikasi MA yang diungkapkan dalam SR. Hasil penelitian yang diperoleh adalah materialitas masih belum cukup terlembagakan seperti yang direkomendasikan oleh pedoman GRI-G4 dan literatur sebelumnya. Jumlah besar MA potensial dapat dikurangi menjadi enam kategori materi yang sangat relevan dan tujuh kategori materi relevan sedang untuk EUC. MA yang didokumentasikan berdasarkan dimensi TBL tidak seimbang dengan ruang yang cukup untuk perbaikan di ketiga dimensi keberlanjutan. Dan masih banyak ruang untuk perbaikan untuk kualitas komunikasi di SR oleh EUC. Sesuai dengan prinsip materialitas GRI, kuantitas yang diusulkan oleh LCT berfokus pada kelengkapan indikator yang tercakup dari informasi yang relevan secara eksklusif (MA), yang diperlukan untuk kualitas komunikasi di SR.

Kurniawan (2018) dengan judul “*An Analysis of Information Materiality on Corporate Sustainability report Using Information Materiality Map: A Review in Mining Industry in Indonesia*”. Objek penelitian pada perusahaan-perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di bidang industri pertambangan khususnya perusahaan pertambangan yang berkompetisi dalam ISRA tahun 2014 sampai 2016. Dengan menganalisis informasi material yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah periode 2014-2016, informasi material dalam laporan keberlanjutan di industri pertambangan adalah (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Kepatuhan terhadap peraturan, (3) Keselamatan dan kesehatan karyawan, (4) Keterlibatan masyarakat setempat, (5) Pelatihan dan pengembangan karyawan, (6) Anti korupsi, (7) Kontribusi sosial ekonomi, (8) Pengelolaan dan kinerja lingkungan, (9) Perlindungan keanekaragaman hayati, (10) Pengelolaan limbah, (11) Pengelolaan air, dan (12) Konsumsi energi.

Aryal (2017) dengan judul “*Materiality Assessment In Sustainability reporting: Case Study Of The Airline Industry*”. Objek penelitian pada 15 industri penerbangan. Dengan menganalisis bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan, peran pemangku kepentingan yang dilibatkan serta masalah material utama yang diidentifikasi dalam maskapai penerbangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penilaian materialitas dari laporan maskapai penerbangan tidak menunjukkan bukti bahwa industri penerbangan telah mengadopsi pendekatan spesifik sektor untuk definisi dan penentuan materialitas. Laporan maskapai kurang transparan dalam analisis materialitas. Sebagian besar laporan juga gagal mendefinisikan materialitas dan menyampaikan kepada pembaca mengapa mereka melakukan analisis materialitas. Meskipun, laporan didasarkan pada pedoman yang sama dan memiliki operasi bisnis yang serupa, ada perbedaan mencolok pada proses, keterlibatan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kurniawan (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pemodelan Peta Materialitas Informasi Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Suatu Tinjauan Mengenai Pelaporan Keberlanjutan Industri Perbankan di Indonesia)”. Objek penelitiannya yaitu 5 perusahaan industri perbankan di Indonesia. Dengan menganalisis model peta materialitas yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan industri perbankan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam waktu 2014 sampai tahun 2016 terdapat 7 informasi yang bersifat material dalam laporan keberlanjutan industri perbankan. Materialitas informasi dalam laporan keberlanjutan perusahaan ditetapkan pada karakteristik perusahaan, jenis industri, dan karakteristik pemangku kepentingan perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Bertemakan Selain Materialitas

Puspitasari et al. (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Kualitas *Sustainability reporting* Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Pada Perusahaan Manufaktur”. Objek penelitiannya yaitu Perusahaan manufaktur (PT. Unilever Tbk, PT. Kalbe FarmaTbk, dan PT. Indofood Tbk). Dengan menganalisis kualitas skor perusahaan pada laporan keberlanjutan berdasarkan GRI. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perusahaan JII dinilai cukup dalam memberikan pengungkapan sesuai standar dalam indeks GRI, akan tetapi jika dilihat pada perolehan skor rata-rata, kualitas *sustainability reporting* setiap perusahaan dalam JII tidak ada yang mencapai predikat informatif.

Suharlina (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Penilaian Kualitas Implementasi *Corporate social responsibility* Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia Berdasarkan Indeks *Global Reporting Iniatif* (GRI)”. Objek penelitiannya yaitu PT ANTAM, PT Bukit Asam, PT Medco Energy, PT Indo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tambangraya Megah. Dengan menganalisis implementasi CSR perusahaan menggunakan indeks GRI. Hasil penelitian yang diperoleh adalah PT ANTAM dalam mengimplementasikan CSR perusahaan cukup memenuhi poin dari indeks GRI. PT Bukit Asam mengimplementasikan CSR di perusahaan kurang memenuhi elemen dalam indeks GRI, PT Medco Energy dan PT Indo Tambangraya Megah mengimplementasikan CSR di perusahaan tidak memenuhi elemen dalam indeks GRI.

Addini et al. (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengungkapan CSR PT. Aneka Tambang Tbk Berdasarkan GRI dan Kaintannya Terhadap Proper”. Objek penelitiannya yaitu PT. Aneka Tambang Tbk. Dengan menganalisis indikator yang dilaporkan berdasarkan GRI G4 dan tingkat persamaan setiap indikator GRI G4 dengan PROPER yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tingkat pengungkapan indikator kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi pada laporan keberlanjutan perusahaan Aneka Tambang Tbk sebesar 37 tahun 2017 (40,66%) dan 33 item indeks tahun 2018 (36,26%) dari 91 item Indikator GRI G4 *Guidelines*. Tingkat persamaan setiap indeks terdapat dalam G.4 dengan PROPER berlandaskan analisis terdapat 4 aspek indkes yang mempunyai kesamaan.

Syahputra et al. (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan G4”. Objek penelitiannya yaitu perusahaan PTBA dan ITMG. Dengan menganalisis bagaimana pengungkapan lingkungan berdasarkan G4. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengungkapan lingkungan PTBA dan ITMG secara keseluruhan telah sesuai dengan GRI-G4.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penelitian Terdahulu Kuantitatif

a. CSR Sebagai Variabel Dependen

Kurniawan dan Astuti (2021) melakukan penelitian pada perusahaan sektor keuangan dan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI. Dengan model penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif. Variabel dependen: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial. Variabel independen: *corporate governance*, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *growth*. Hasil penelitiannya pada perusahaan sektor keuangan: *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan. *Growth* berpengaruh tidak signifikan. Hasil penelitian pada perusahaan sektor non keuangan: *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan. Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan. *Leverage* berpengaruh tidak. *Growth* berpengaruh positif dan signifikan.

Umroh (2020) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Model penelitian yang digunakan regresi berganda. Variabel dependen: pengungkapan CSR. Variabel independennya: kepemilikan institusional, likuiditas, *firm size*, dan profitabilitas. Hasil penelitiannya adalah secara parsial kepemilikan institusional, *firm size*, dan profitabilitas berpengaruh pada pengungkapan CSR. Sedangkan secara parsial likuiditas tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Secara simultan likuiditas, *firm size*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fitriyah (2020) melakukan penelitian pada perusahaan sektor *property, real estate and building construction* di BEI. Model penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda. Variabel dependen: *CSR disclosure*. Variabel independen: profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan. Hasil penelitiannya adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada *CSR disclosure*. Sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada *CSR disclosure*.

Afsari et al. (2017) melakukan penelitian pada perusahaan yang mengikuti ISRA tahun 2013-2015. Model penelitian yang digunakan regresi berganda. Variabel dependen: pengungkapan *Sustainability Report (SR)*. Variabel independen: *leverage* perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitiannya adalah *leverage* berpengaruh negatif signifikan pada luas pengungkapan SR. Sedangkan ukuran perusahaan, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan pada luas pengungkapan SR.

b. CSR Sebagai Variabel Independen

Pratama et al. (2019) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Model penelitian regresi linier berganda. Variabel dependen: nilai perusahaan. Kemudian variabel independen: kinerja lingkungan, *sustainability report* dimensi sosial, lingkungan, ekonomi. Kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan. Hasil penelitiannya adalah *sustainability report* dimensi ekonomi tidak berpengaruh



signifikan pada nilai perusahaan, sedangkan *sustainability report* dimensi lingkungan dan sosial berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan.

Purnaningsih (2018) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Model penelitian yang digunakan regresi multivariate. Variabel dependen: kinerja keuangan perusahaan. Kemudian variabel independen: CSR. Hasil penelitiannya adalah CSR berpengaruh positif pada ROE dan ROA, CSR tidak berpengaruh terhadap ROS.

Muslimah (2018) melakukan penelitian pada perusahaan non-keuangan di BEI. Model penelitian yang digunakan regresi berganda. Variabel dependen: ROA, DER. Variabel independen: pengungkapan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitiannya adalah kinerja ekonomi tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas, kinerja sosial mempunyai pengaruh positif pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas, dan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas. Kinerja ekonomi mempunyai pengaruh negatif pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio solvabilitas. Kinerja sosial dan lingkungan tidak mempunyai pengaruh pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio solvabilitas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan industri dasar dan kimia

Setiap emiten ketika menentukan isi laporan keberlanjutan dapat menerapkan prinsip-prinsip pelaporan yang disyaratkan oleh GRI. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan suatu laporan keberlanjutan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkualitas. Salah satu prinsip tersebut yaitu materialitas. Untuk menilai materialitas dari topik yang dianggap material dalam setiap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan oleh emiten, emiten perlu mengetahui terlebih dahulu definis materialitas itu sendiri. Dengan memahami definisi materialitas tersebut akan membantu emiten untuk menentukan topik utama yang material dan relevan serta memastikan kualitas informasi dari laporan keberlanjutan. Dalam mendefinisikan materialitas dalam laporan keberlanjutannya emiten dapat menerapkan kriteria materialitas yang ditetapkan oleh GRI dan AccountAbility (AA1000AP).

Oleh karena itu, pada penelitian peneliti akan menerangkan dan mengetahui setiap emiten industri dasar dan kimia dalam mendefinisikan materialitas dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

2. Peran pemangku kepentingan yang dipertimbangkan oleh industri dasar dan kimia

Pada Standar GRI dijelaskan untuk menilai materialitas dan menentukan topik material, emiten perlu mempertimbangkan prioritas, dampak, dan kekhawatiran dari pemangku kepentingan. Serta saat membuat keputusan mengenai isi laporan keberlanjutan, emiten akan melakukan pertimbangan dari impian serta kepentingan yang wajar para pemangku kepentingan. Proses keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut akan membantu memahami harapan, kepentingan, dan informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan tersebut. Maka dalam mempertimbangkan peran pemangku kepentingan untuk menilai materialitas emiten dapat menerapkan prinsip

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



inklusivitas pemangku kepentingan berdasarkan Standar GRI, dan tahap pelibatan pemangku kepentingan dalam penilaian materialitas pada GRI G4.

Oleh karena itu, pada penelitian peneliti akan menerangkan dan mengetahui setiap emiten industri dasar dan kimia dalam mempertimbangkan peran pemangku kepentingan dan proses keterlibatannya untuk menilai materialitas dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

3. Masalah material utama yang didefinisikan oleh industri dasar dan kimia

Dalam aktivitas setiap emiten pasti akan menimbulkan dampak dan masalah yang dihasilkan dari proses produksi maupun aktivitasnya. Emiten perlu mempresentasikan berbagai dampak dan masalah tersebut sebagai masalah material dalam analisis materialitas. Maka dalam mendefinisikan masalah material utama untuk menilai materialitas, emiten dapat menerapkan dan memenuhi prinsip materialitas berdasarkan Standar GRI dan AccountAbility (AA1000AP).

Oleh karena itu, pada penelitian peneliti akan menerangkan dan mengetahui masalah material utama yang diidentifikasi oleh setiap emiten industri dasar dan kimia serta pengelompokan masalah material utama di bawah aspek-aspek tertentu yang disajikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyajikan kerangka pemikiran:

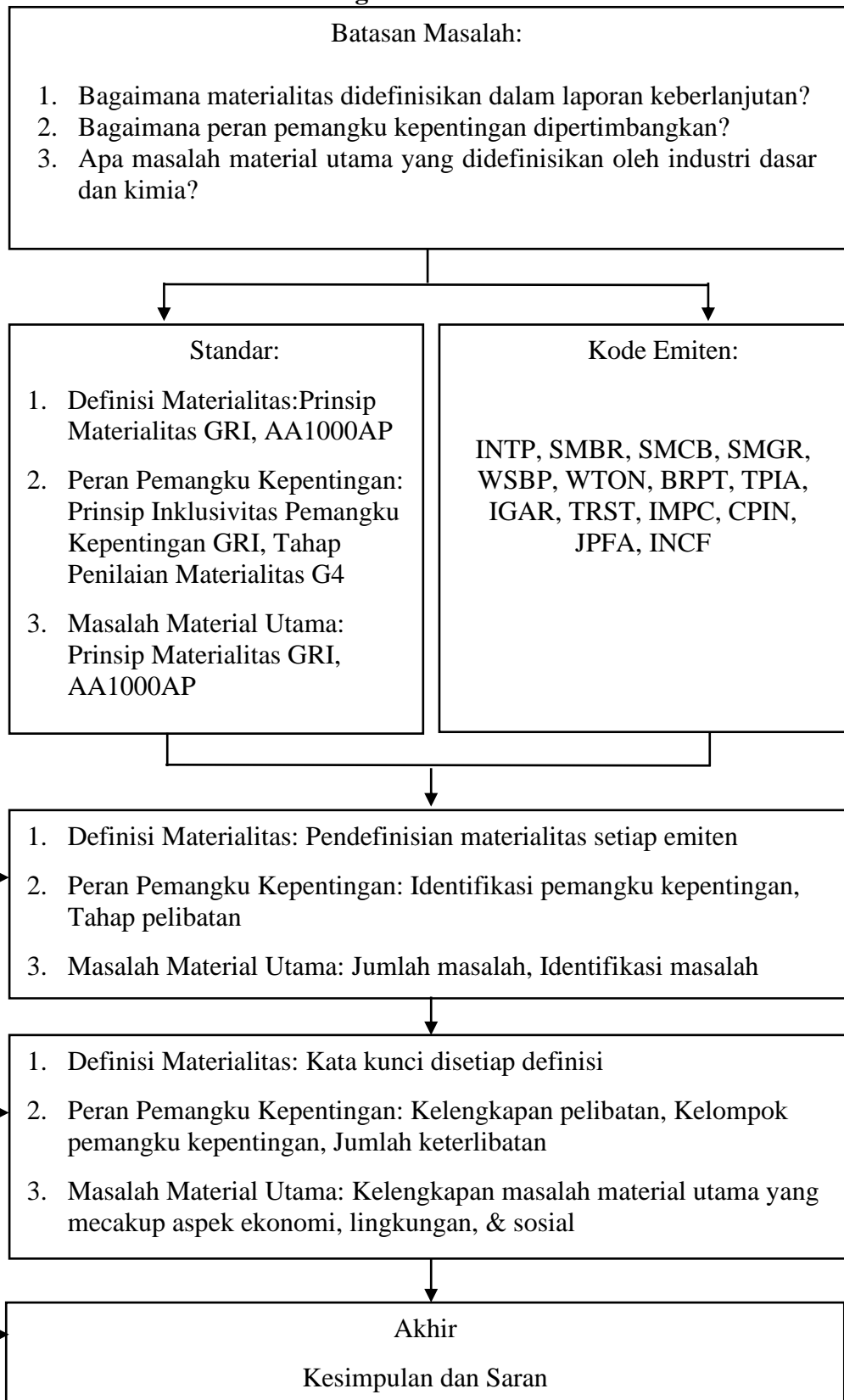
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber: Data diolah kembali